BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum serentak pada tanggal 17 April 2019 adalah pemilu serentak pertama kali di Indonesia. Pemilu ini sedikit berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu serentak ini, tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun juga memilih dewan legislatif DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilu untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Menurut UU ini, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai. Didaftarkan dan ditetapkan dengan putusan keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Salah satu peserta pada pemilihan umum 2019 adalah Partai Demokrat. Pada tahun 2009, Partai Demokrat memenangkan Pemilu dengan jumlah suara sebanyak 21.703.137 suara. Kemenangan yang diperoleh Partai Demokrat diprediksi karena faktor pencitraan Ketua Dewan Pembina, SBY. Citra SBY dinilai sangat berpengaruh besar untuk menaikkan perolehan suara Demokrat

dalam pemilu kali ini. (Sumber: Detiknews, 2009 diakses tanggal 1 September 2022)

Namun, Partai Demokrat juga mengalami banyak prahara. Seperti di penghujung tahun 2012 lalu, salah satu kadernya yang bernama Ruhut Sitompul mendapat kado istimewa, yaitu diberhentikan dari kepengurusan DPP Partai Demokrat. Rentetan kasus korupsi mendera elite partai. Kasus tersebut bahkan tidak lagi menjadi masalah besar, lebih tepatnya sudah membudaya, budaya korupsi yang masih massal terjadi bahkan di setiap tahunnya. Partai Demokrat juga termasuk dalam daftar tersebut.

Kader-kader yang menyalahgunakan wewenang, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, ketika KPK menetapkan Sekretaris Dewan Pembina, ketika masih menjabat sebagai Menpora, Andi Mallarangeng menjadi tersangka karena terlibat Kasus Hambalang. Sementara di sisi lain, Angelina Sondakh juga ikut divonis 12 tahun penjara karena kasus korupsi. Nasib Ketua Umum Anas Urbaningrum juga di ujung tanduk, karena sering disebut-sebut terlibat Korupsi Hambalang. Angin ribut yang tengah menimpa Partai Demokrat mulai bertiup kencang setelah Bendahara Umumnya yang bernama Muhammad Nazaruddin ketika itu tertangkap KPK dan kemudian bernyanyi sumbang. Nyanyiannya lantas menjadi bola liar dan akhirnya menyeret beberapa petinggi partai. (Sumber: Merdeka.com, 2014 diakses tanggal 1 September 2022)

Pada tahun 2013, ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di gantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, karena Anas Urbaningrum dan

beberapa politikus Partai Demokrat lainnya terjerat kasus korupsi proyek Hambalang. Kasus korupsi proyek Hambalang mencoreng Demokrat, yang mengakibatkan perolehan suara Partai Demokrat mengalami penurunan signifikan tiap jelang ajang pemilu. Partai Demokrat mengalami penurunan dari mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan turun lagi menjadi 7,3 persen. (Sumber: Republika.co.id, 2021 diakses tanggal 12 maret 2022). Konflik internal dan kasus korupsi pejabat Partai Demokrat ini membuat Partai Demokrat mengalami krisis. Korupsi adalah faktor yang paling dominan yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Partai dibentuk untuk bisa menjadi penyalur dan mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, selain itu partai juga diharapkan dapat menciptakan elite-elite baru sebagai wujud regenerasi kepemimpinan. Namun, kenyataannya kesibukan partai untuk menciptakan elite baru dan merebut kepemimpinan sangat dominan. Tingginya angka penilaian masyarakat tentang krisis partai politik menjelang pemilu 2014 menyebabkan tingkat kepercayaan publik kepada masyarakat menjadi menurun (Budianto, Heri 2014, 165). Untuk menembalikan kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat, maka partai demokrat perlu melakukan penataan ulang dan menyusun strategi dalam menangani krisis partai politiknya.

Peneliti mengangkat judul penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Pontianak. Diketahui pada pemilu legislatif tahun 2014 dan tahun 2019 Partai Demokrat Kota Pontianak

mengalami penurunan jumlah perolehan suara dari pemilu legislatif tahun 2009. Pada tahun 2009 Partai Demokrat Kota Pontianak memenangkan pemilu legislatif dengan mendapatkan 8 kursi. Adapun perolehan kursi Partai Demokrat Kota Pontianak tahun 2009, 2014, dan 2019 dapat dilihat pada table-tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Perolehan Suara Sah dan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pontianak Tahun 2009.

No	No Urut Peserta Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi
1	31	Partai Demokrat	8
2	1	Partai Hanura	4
3	12	PPD	3
4	23	Partai Golkar	5
5	24	PPP	4
6	28	PDIP	4
7	8	PKS	4
8	34	PKNU	2
9	9	PAN	3
10	29	PBR	3
11	2	PKPB	1
12	27	PBB	1
13	13	PKB	1
14	44	Partai Buruh	1
15	25	PDS	1

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pontianak, Tahun 2022

Pada pemilu 2009, Partai Demokrat berada pada posisi ke-1 dengan jumlah suara 15328 suara, dan berhasil mendapatkan 8 kursi di DPRD Kota Pontianak. Pada tingkat nasional Partai Demokrat juga mengalami kejayaan pada pemilihan legislatif Tahun 2009, yang kala itu Partai Demokrat

mendulang 20,85 persen suara sah nasional. Kejayaan Partai Demokrat ini tentunya tidak terlepas dari SBY sebagai citra Partai Demokrat, beliau dinilai sebagai sosok yang berwibawa dan berkharisma semasa beliau menjadi Presiden.

Tabel 1.2

Jumlah Perolehan Suara Sah dan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pontianak Tahun 2014.

No	No Urut Peserta Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi
1	4	PDIP	8
2	1	Partai Nasdem	4
3	5	Partai Golkar	3
4	8	PAN	5
5	2	PKB	4
6	6	Partai Gerindra	4
7	10	Partai Hanura	4
8	9	PPP	2
9	7	Partai Demokrat	3
10	15	PKPI	3
11	14	PBB	1
12	3	PKS	1

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pontianak, Tahun 2022

Pada pemilu 2014, Partai demokrat berada di posisi ke-9 dengan jumlah suara 19.996 atau 6,63% dan mendapat 3 kursi di DPRD Kota Pontianak.

Tabel 1.3

Jumlah Perolehan Suara Sah dan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pontianak Tahun 2019.

No	No Urut Peserta Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi
1	3	Partai PDIP	6
2	5	Partai Nasdem	6
3	2	Partai Gerindra	6
4	8	Partai PKS	5
5	1	Partai PKB	3
6	12	Partai PAN	3
7	13	Partai Hanura	3
8	10	Partai PPP	4
9	4	Partai Golkar	3
10	14	Partai Demokrat	3
11	20	Partai PKPI	2
12	19	Partai PBB	1
13	9	Partai Perindo	0
14	11	Partai PSI	0
15	7	Partai Berkarya	0
16	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pontianak, Tahun 2022

Pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Pontianak, Partai Demokrat berada pada posisi ke-10 dan memperoleh suara sebanyak 17.763 atau sekitar 6,67% dan berhasil mendapatkan 3 kursi di DPRD Kota Pontianak. Penurunan keberhasilan dalam memperoleh kursi di DPRD Kota Pontianak ini cukup drastis dari tahun 2009 ke tahun 2019. Diketahui pada pemilu 2019 Kota Pontianak, dapil yang berhasil meraih kursi legislatif tersebut adalah dapil

Pontianak Kota; Anwar Ali, Pontianak Utara; Tan Lie Hian, dan Pontianak Selatan; Ariadi. Dapil yang tidak memperoleh kursi adalah Pontianak Barat dan Pontianak Timur. Penyebabnya adalah calon legislatif di Pontianak Barat dan Pontianak Timur yang kurang populer di masyarakat. Politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, oleh karena itu kontestan memerlukan suatu metode yang dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, isu politik, gagasan politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai, dan program kerja partai pada masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi adalah:

Pada pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh sejumlah 8 kursi, pada pemilu 2014 Partai Demokrat memperoleh 3 kursi, dan pada pemilu 2019 Partai Demokrat memperoleh 3 kursi. Ini menunjukkan penurunan signifikan perolehan kursi Partai Demokrat Pontianak di pemilu 2019.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilihan umum legislative tahun 2019 di Kota Pontianak.

1.4. Rumusan Masalah

Apa yang menyebabkan faktor-faktor rendahnya perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif Tahun 2019 di Kota Pontianak?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Pontianak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi sumber yang akurat, dapat memberikan pengetahuan dan menjadi suatu acuan mahasiswa ilmu politik untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai strategi politik dalam menghadapi pemilihan legislatif.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis dan pembaca, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa masalah.
- b. Dapat dijadikan referensi dan evaluasi Partai Demokrat di Kota Pontianak dalam pemilihan umum legislatif yang akan datang.